

BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN KEUANGAN SEDERHANA BAGI PETUGAS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

Sahnan Rangkuti, Nurhayati, Tomi Jaffisa
Prodi Manajemen, Universitas Dharmawangsa, Medan
E-mail: sahnranrangkuti@dharmawangsa.ac.id

Abstrak

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan bimbingan teknis manajemen keuangan sederhana bagi petugas penyuluh pertanian lapangan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pancurbatu. Penyuluh pertanian lapangan merupakan petugas yang diberi amanah oleh pemerintah untuk memberi penyuluhan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani untuk mentransfer ilmu budidaya pertanian, sehingga dibutuhkan. Metode pengabdian dilakukan dalam 3 tahap yaitu, pra pelaksanaan dengan merumuskan masalah, menetapkan waktu, tempat dan peserta kemudian membuat kesepakatan. Tahap kedua yaitu pelaksanaan dengan memberikan penjelasan dan bimbingan. Tahap ketiga yaitu pasca pelaksanaan melalui perancangan aktivitas kunci dengan memastikan realisasi capaian kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan keterampilan penyuluh pertanian dalam penyusunan buku pengeluaran dan penerimaan kas serta buku penjualan dan pembelian. Hasil lainnya juga didapatkan peningkatan kemampuan petugas penyuluh pertanian lapangan terhadap dinamika kelompok tani masing-masing binaannya.

Kata kunci: *Bimbingan Teknis, Manajemen Keuangan Sederhana.*

1. PENDAHULUAN

Balai Penyuluhan Pertanian adalah salah satu lembaga pada sektor pertanian yang langsung berhubungan dengan masyarakat petani/kelompok tani melalui penyuluh pertanian lapangan. Keberadaan Balai Penyuluhan Pertanian diatur dalam pasal 8 ayat 2 Undang Undang nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutangan. Fungsi utama dari Balai Penyuluhan Pertanian adalah sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Secara teknis dan struktural, Balai Penyuluhan Pertanian Pancurbatu dan Namorambe, secara struktural berada pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah VII di Kecamatan Pancurbatu dan merupakan perpanjangan tangan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang yang didalamnya terdapat dua Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yaitu Pancurbatu dan Namorambe.

Pada dasarnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berfungsi sebagai wadah bagi petugas penyuluh pertanian dan kelompok tani untuk meningkatkan kemampuan teknis dan administratif dalam melakukan pembinaan kepada petani/kelompok tani, baik untuk kegiatan usaha tani yang bersifat budidaya (on farm) maupun kegiatan pendukung (off farm). Pemerintah berpendapat bahwa pembinaan petani yang paling efektif adalah melalui petani yang tergabung dalam kelompok tani. Dalam hal ini menurut Djoko Soejono (2020), "salah satu alasan petani bersedia bergabung dengan kelompok tani adalah adanya kesesuaian antara tujuan yang dimiliki kelompok tani dengan tujuan pribadi petani". Tentu organisasi kelompok tani/Gapoktan memiliki anggota yaitu petani yang lahan usaha taninya satu hamparan tanpa membedakan domisilinya. Tujuan organisasi akan tercapai, jika "hubungan antar manusia tercipta serta terpelihara dengan baik, ada kesediaan melebur keinginan individu demi tercapainya kepentingan bersama (Malayu SP Hasibuan : 2016). Sebagai organisasi nirlaba, kelompok tani tentu memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai, yaitu untuk meningkatkan ketrampilan petani anggota dan kesejahteraannya. Namun demikian organisasi nirlaba, tetap membutuhkan manajemen bahkan lebih dari yang dilakukan bisnis (J. David Hanger : 2013). Oleh sebab itu penting bagi pengurus kelompok tani mempunyai kemampuan manajemen, termasuk manajemen keuangan walupun secara sederhana.

Dalam hubungan ini BPP diharapkan dapat berperan bertukar informasi dan pengalaman yang berkaitan dengan usaha pertanian, baik sesama petani maupun petugas. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, maka setiap minggu BPP akan melakukan pertemuan dengan petugas untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi masing-masing kelompok tani

binaannya maupun untuk mendapatkan informasi baru yang dapat disampaikan kepada kelompok tani binaannya. Setiap petugas penyuluh pertanian mempunyai tanggung jawab 12 s.d. 16 kelompok tani binaan yang disebut dengan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP). Untuk meningkatkan daya tawar, kemampuan permodalan dan pasar, kemudahan akses informasi, sarana dan prasarana produksi, kemampuan budidaya serta pembinaan kelompok tani dapat membentuk gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang difasilitasi PPL. Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) berkewajiban untuk melakukan kunjungan ke WKPP setiap minggu untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok tani atau Gapoktan dan bila ditemui sesuatu permasalahan atau kejadian akan dilaporkan pada pertemuan yang diadakan setiap minggu di BPP, yaitu setiap hari Rabu dan selanjutnya dilaporkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang pada rapat Posko setiap hari Kamis. Rapat ini dimaksudkan untuk mendapatkan penanganan secara komprehensif atas berbagai masalah kelompok tani, dari seluruh pemangku kepentingan pertanian, seperti Pengamat Hama, Petugas Benih, Statistik, BRI dan Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten dan Propinsi.

Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pancur Batu memiliki petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berjumlah 13 orang dengan wilayah binaan mencakup 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pancur Batu, dan Sibolangit. Pada umumnya kegiatan usaha tani yang dilaksanakan petani binaan dan menjadi tanggung jawab pembinaan PPL adalah mencakup subsektor, pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Ragam data yang berkaitan dengan aktivitas penyuluhan pertanian di wilayah BPP Pancur Batu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel – 1
Data Kondisi Sektor Pertanian Wilayah Kerja
Balai Penyuluhan Pertanian Pancur Batu Tahun 2020

No	Uraian	Kecamatan	
		Pancur Batu	Sibolangit
1	Jumlah Desa	25	30
2	Luas sawah (ha)	223,11	859,7
3	Luas Tegal/Kebun (ha)	6723	205
4	Luas Huma (ha)	650	10
5	Kakao (ha)	116	15
6	Kelapa Sawit (ha)	223,7	4
7	Kelapa (ha/btg)	137	-
8	Aren (ha/btg)	-	33
9	Karet (ha)	79	120
10	Kerbau (ekor)	177	86
11	Kambing (ekor)	5247	735
12	Ayam Buras (ekor)	19464	27393
13	Itik (ekor)	18162	-
14	Babi (ekor)	3077	1641
15	Durian (ha)	3	110,7
16	Belimbing (ha)	81	-
17	Jambu Biji (ha)	126	3530
18	Jambu Air (ha)	46	-
19	Pisang (ha)	9	35200
20	Duku (ha)	10	155
21	Manggis (ha)	-	216
22	Alpukat (ha)	-	63
23	Petai (ha)	-	64,5
24	Salak (ha)	87	700

Sumber : Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wil VII

Tabel – 2

Data Kelembagaan Pertanian Tahun 2020

No	Uraian	Kecamatan	
		Pancurbatu	Sibolangit
1	Jumlah Gapotan	12	7
2	Jumlah Kelompok Tani	101	83
3	Jumlah WKPP	101	85

Sumber : Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wil VII

Usaha tani tentu tidak hanya berfokus pada aspek budidaya saja, tetapi keberhasilan usaha tani juga berkaitan erat dengan aspek off farm, termasuk manajemen keuangan kelompok tani. Secara sederhana petani yang tergabung dalam kelompok tani harus memiliki kemampuan dalam memanej dana yang ada dikelompoknya, sehingga akan tercipta transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggung jawaban yang harus dicapai (Bevaola Kusumasari 2015). Artinya kewajiban individu/kelompok untuk memenuhi tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya. Tentu akuntabilitas “tidak hanya institusi pemerintahan yang harus melaksanakannya, sektor swasta dan organisasi masyarakat juga harus bersifat akuntabel bagi stakeholdernya” (Randy R Wrihatnolo : 2007). Kelompok tani sebagai organisasi dari masyarakat tani perlu melaksanakan prinsip akuntabilitas dari setiap aktivitasnya, sehingga mendapat kepercayaan dan dukungan dari petani anggota, dan untu itu perlu dukungan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitasnya, Sementara transparansi adalah adanya keterbukaan dan kemudahan untuk mendapatkan akses informasi atas suatu kegiatan atau fungsi yang dijalankan suatu lembaga. Sebagaimana di kemukakan Randy R Wriatnolo (200&) Informasi “tersedia secara cuma cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung:. Khususnya lembaga publik. transparansi dan akuntabilitas tentu menjadi pilar utama untuk menciptakan dinamika kelompok yang solid dan kondusif.

Secara individu pemahaman atas manajemen keuangan secara sederhana akan membantunya untuk mendayagunakan uang yang dimiliki secara efektif dan efisien, memahami dengan benar untung rugi secara benar dari kegiatan usaha tani yang dilakoninya. Dalam kaitan ini sesuai dengan hasil penelitian Fitri Sukmawati (2019), transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 Pemerintahan Desa di Kabupaten Garut.

Secara ekonomi, petani yang tergabung dalam kelompok tani menurut Imanuddin Abdullah sebagaimana dikutip Dedy Afrianto (2019) memiliki lahan secara rata-rata 0, 8 ha, Pada umumnya dengan ketrampilan teknis budidaya belum maksimal, kemampuan teknis of farm belum memadai dan dinamika kelompok belum berjalan maksimal. Permasalahan ini tentunya menjadi fungsi utama dari PPL untuk membantu kelompok tani mengatasinya. Untuk dapat membantu, mendampingi petani mengatasi persoalan yang dihadapinya, sebagai pembina, pendamping, penyuluh, dan atau fasilitator, PPL harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk disuluhkan kepada petani, kelompok tani atau Gapoktan, baik ketrampilan teknis budidaya (on farm) maupun non teknis budidaya (off Farm). Ketrampilan off farm, khususnya dalam mengelola keuangan kelompok/Gapoktan secara sederhana dan mudah dipahami masih sangat terbatas perlu dipahami PPL untuk disuluhkan kepada petani. Hal ini penting karena setiap individu atau lembaga akan mengambil keputusan keuangan (Suad Husnan : 2018), “Setiap keputusan yang diambil akan berimplikasi pada keuang individu atau lembaga, “untuk itu perlu dilakukan penilaian (Lukas Seia Atmaja : 2008).

Kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting untuk meningkatkan dinamika kelompok tani, dan hal ini akan tercapai bila kelompok diantaranya dapat memajemen keuangan dengan baik. Pada umumnya masalah keuangan publik termasuk kelompok tani adalah : “ masalah penerimaan atau pendapatan dan belanja atau pengeluaran (Abdul Halim : 2014). Tentunya manajemen keuangan dalam konteks ini secara sederhana sesuai dengan kemampuan nalar dari petugas untuk dapat ditransfer kepada petani, kelompok tani/Gapoktan. Atas dasar uraian diatas, maka kegiatan pengabdian masyarakat dengan mengambil tema manajemen keuangan sederhana ini menjadi penting sebagai bekal bagi petugas dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyuluh.

Pembinaan terhadap petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Gapoktan, secara fungsional dilakukan oleh penyuluh pertanian lapangan. Penyuluh pertanian lapangan (PPL) terdiri

dari PPL ASN dan Kontrak serta Swadaya. Seyogianyanya setiap desa harus diisi minimal satu orang petugas PPL. Namun demikian karena keterbatasan jumlah PPL, masih terdapat beberapa PPL yang membina dua desa.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis manajemen keuangan sederhana ini direncanakan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Pra-Pelaksanaan Kegiatan

Dalam tahap ini, tim pengusul melakukan komunikasi awal dengan mitra untuk:

- Merumuskan masalah dan bentuk kegiatan dengan mitra.
- Menetapkan waktu, tempat, peserta dengan mitra.
- Membuat kesepakatan tanggung jawab masing masing pihak

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Dalam tahapan ini aktivitas yang dilaksanakan pengabdian antara lain :

- Penjelasan tentang manajemen keuangan kelompok secara sederhana dan penumbuhan dinamika kelompok
- Bimbingan Teknis pembuatan buku administrasi keuangan kelompok (buku kas, penjualan dan pembelian, inventaris, tabungan kelompok.

c. Tahap Pasca Pelaksanaan Kegiatan

Dalam tahapan ini, tim pengabdian merancang beberapa aktivitas kunci yang dimaksudkan untuk:

- Memastikan realisasi capaian kegiatan yang sesuai dengan target yang dicanangkan.
- Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Petani di Indonesia, khususnya di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara secara umum memiliki karakteristik antara lain kepemilikan lahan terbatas (rata-rata 0,8 ha), usia relatif tidak muda (45-60 tahun), tersebar luas dengan ketrampilan teknis budidaya (on farm) maupun budidaya (off farm) kurang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan penyuluh pertanian lapangan sebagai pendamping yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dibidang budidaya pertanian maupun non budidaya untuk membantu petani mengatasi masalahnya. Lokasi PKM ini sebagaimana dikemukakan sebelumnya adalah Balai Penyuluhan Pertanian Pancur Batu.

Berdasarkan identifikasi pendahuluan atas permasalahan yang dihadapi mitra adalah kapabilitas dan kapasitas penyuluh pertanian lapangan masih rendah di bidang off farm khususnya dalam manajemen keuangan secara sederhana. Untuk itu kepada petugas penyuluh pertanian perlu diberikan ketrampilan teknis tentang manajemen keuangan dan peningkatan dinamika kelompok melalui bimbingan teknis.

Bimbingan teknis manajemen keuangan disampaikan Tim Pengabdian sebagai fasilitator dan narasumber. Topik-topik manajemen keuangan sengaja dipilih yang sederhana, mudah dipahami dan dibutuhkan kelompok tani/gapoktan. Disamping itu dilaksanakan bimbingan teknis tentang peningkatan motivasi dan dinamika kelompok. Terdapat beberapa buku yang berkaitan yang berkaitan dengan aktivitas kelompok tani yang dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang telah dilakukan bimbingan teknis penyusunannya, antara lain :

- a. Buku pengeluran dan penerimaan kas,
 - b. buku penjualan dan pembelian,
 - c. buku inventaris kelompok dan buku tabungan,
- yang disertai dengan bukti-bukti transaksi dan pengadministrasiannya, dan dirancang penyusunannya sesederhana mungkin guna memudahkan petugas penyuluh penyuluh kepada kelompok tani/gapoktan sekaligus memudahkan kelompok tani/gapoktan menggunakannya. Disamping itu juga difasilitasi dan dibimbing bagaimana motivasi individu dan kelompok serta upaya meningkatkan dinamika kelompok melalui berbagai permainan orang dewasa serta penyusunan dan pengadministrasian aktivitas kelompok.

Dalam pelaksanaan kegiatan, para peserta cukup antusias yang dibuktikan dengan kehadiran seluruh peserta sesuai waktu (100%) dan keaktifan peserta selama bimbingan teknis berlangsung. Hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan disimpulkan :

- a. Petugas penyuluh pertanian lapangan dibimbing secara teknis oleh pengabdian dan telah mampu dalam penyusunan buku pengeluaran dan penerimaan kas, penjualan dan pembelian, inventaris dan tabungan anggota.
- b. Dapat memotivasi kelompok dan peningkatan dinamika kelompok melalui teknik permainan.
- c. Dapat melaksanakan administrasi kegiatan kelompok untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas

4. KESIMPULAN

Pada dasarnya kegiatan PKM dimaksudkan untuk membantu mitra dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama dengan tim pengabdian. Dalam konteks ini maka kegiatan PKM inidirectional guna memberi ketrampilan teknis tentang manajemen keuangan sederhana kepada petugas penyuluh pertanian lapangan yang berada di Balai Penyuluh Pertanian Pancurbatu. Dengan demikian diharapkan petugas penyuluh pertanian akan memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai bekal dalam penyuluh kepada kelompok tani/gapoktan, khususnya tentang manajemen keuangan sederhana. Selanjutnya diharapkan apabila manajemen keuangan sederhana ini telah disuluh dan dipraktekkan kelompok tani/gapoktan akan tercipta transparansi dan akuntabilitas kelompok tani/gapoktan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Seluruh rangkaian acara bimbingan teknis ini telah berlangsung lancar sesuai yang direncanakan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, Lukas Setia, (2018), *Tori & Praktik Manajemen Keuangan*, Yogyakarta Penerbit Andi,
- Hasibuan, Malayu, SP (2016), *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Jakarta , Penerbit PT. Bumi Aksara,
- Husnan, Suad, dan Pudjiastuti, Enny, (2018). *Dasar Dasar Manajemen Keuangan*,. Yogyakarta, UPP STIM YKPN,
- Halim, Abdul (2014), *Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*, Jakarta, Salemba Empat,
- Kaumasari, Bevaola, Dwi Putrianti, Septiana, (2015), *Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol III*
- Hunger, J. David, Wheelen, Thomas, (2013), *Manajemen Strategis*,. Yogyakarta, Penerbit Andi,.
- Siukmawati, Fitri, Nurfitriani, Alfi, (2019), *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Garut*, *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal dan UMKM*, Vol. 2 No. 1
- Wrihatnolo, Randy R, Dwidjowijoto, Riant Nugroho, (2007), *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia,
- Undang Undang Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian< Perikanan dan Kehutanan